

## **Abstrak**

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang Kreditur (Bank) kepada Debitur (masyarakat yang mengajukan kredit) yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Banyak terjadi pihak Bank menganggap bahwa Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban (pembayaran cicilan kredit), sehingga dilakukan penyitaan barang jaminan. Pihak Bank merasa memiliki hak untuk melakukan penyitaan dalam upaya melindungi lembaganya dari kerugian yang disebabkan kelalaian Debitur. Sebaliknya, Debitur merasa bahwa tindakan penyitaan itu merugikan mereka sehingga mereka melakukan protes kepada pihak bank. Permasalahan yang diangkat yaitu perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan upaya debitur terhadap pihak ketiga yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normative, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian data yang dengan lengkap. Tahap penelitian yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, yang meliputi Peraturan PerUndang-Undangan, juga buku-buku penunjang, dan mengumpulkan data-data di lokasi penelitian dalam proses peneliti menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 terdapat ketentuan yang bilamana debitur melakukan wanprestasi dalam menjalankan perjanjian, pihak kreditur tidak bisa begitu saja melakukan penyitaan secara paksa karena pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Menyelesaikannya dengan cara penyelematan kredit dan penyelesaian kredit, atau bisa dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan atau juga dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau secara musyawarah. Atau yang paling tepat cara menyelesaikannya yaitu dengan cara membayar semua keterlambatan pembayaran dan beserta denda nya dan jangan sampai terlambat membayar kembali.

Kata kunci : Jaminan fidusia.

## **Abstract**

Fiduciary agreement is an agreement for creditors (Bank) payable to debtors (people who apply for credit) which involves a guarantee. The position of the guarantee is still under the control of the collateral owner. There are many cases where the Bank considers that the debtor is considered to have committed default due to not carrying out an obligation (credit installment payment), so that the collateral is confiscated. The Bank feels it has the right to confiscate in an effort to protect the institution from losses caused by the debtor's negligence. On the other hand, the debtor felt that the foreclosure action was detrimental to them so they protested to the bank. The issues raised include the legal protection of debtors against credit agreements with fiduciary guarantees and the debtor's efforts against third parties who commit acts of illegal acts.

The preparation of this thesis uses a normative juridical approach, and the research approach used is descriptive-analytical, which is to describe the results of the research data completely. The research stage is collecting materials obtained from secondary sources, which include the Laws and Regulations, as well as supporting books, and collecting data at the research location in the research process using field studies and literature studies.

The results of the research can be concluded that in the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU/XVII/2019, there is a provision that if the debtor defaults in carrying out the agreement, the creditor cannot just forcibly confiscate because in principle the confiscation of goods belonging to the debtor who defaults can only be carried out on the basis of a court decision. Solve it by means of credit saving and credit settlement, or it can be by submitting a lawsuit to the court or also by means of consultation, negotiation, conciliation, or by deliberation. Or the most appropriate way to solve it is by paying all late payments and their fines, and don't be late paying back.

Keywords: fiduciary guarantee.